

MILIK PERPUSTAKAAN
PPS MAGISTER ADM. PUBLIK UMA

**IMPLEMENTASI MUSYAWARAH PERENCANAAN
PEMBANGUNAN (MUSRENBANG)
DI KECAMATAN MEDAN AREA KOTA MEDAN**

TESIS



Oleh

Abuhanifah Batubara

NPM. 031801061

**PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

**M E D A N
2005**

**IMPLEMENTASI MUSYAWARAH PERENCANAAN
PEMBANGUNAN (MUSRENBANG)
DI KECAMATAN MEDAN AREA KOTA MEDAN**

TESIS

Untuk Memperoleh Gelar Magister Administrasi Publik (MAP)
Pada Program Pascasarjana Universitas Medan Area



Oleh

Abuhanifah Batubara

NPM. 031801061

**PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA
M E D A N
2005**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA
PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK**

HALAMAN PERSETUJUAN

**Judul : Implementasi Musyawarah Perencanaan
Pembangunan (Musrenbang) Di Kecamatan
Medan Area Kota Medan**

N a m a : Abuhanifah Batubara

N I M : 031801061

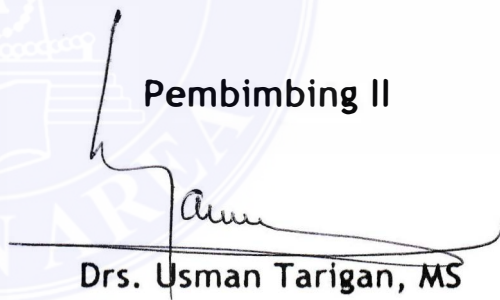
Menyetujui

Pembimbing I



Drs. Kariono, MA

Pembimbing II



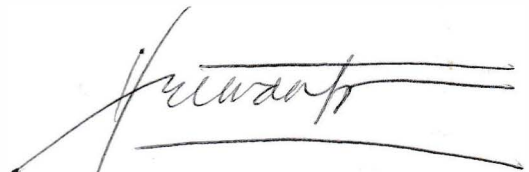
Drs. Usman Tarigan, MS

**Ketua Program Studi
Magister Administrasi Publik**



Drs. Kariono, MA

**Direktur
Program Pascasarjana-UMA**



Drs. Heri Kusmanto, MA

**UNIVERSITAS MEDAN AREA
PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK**

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini dipertahankan di depan Panitia Penguji Tesis
Program Pascasarjana Magister Administrasi Publik
Universitas Medan Area

Pada Hari : Kamis

Tanggal : 30 Juni 2005

Tempat : Program Pascasarjana Magister Administrasi
Publik Universitas Medan Area.

PANITIA PENGUJI

Ketua : Drs. Heri Kusmanto, MA

Sekretaris : Ir. Erwin Pane, MS

Anggota I : Drs. Kariono, MA

Anggota II : Drs. Usman Tarigan, MS

Penguji Tamu : Drs. R. Hamdani Harahap, MSi (.....)

Handwritten signatures of the examination committee members, including the Chairman (Drs. Heri Kusmanto, MA), Secretary (Ir. Erwin Pane, MS), and members (Drs. Kariono, MA and Drs. Usman Tarigan, MS). Each signature is written over a dotted line.

A B S T R A K

Implementasi Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Kecamatan Medan Area Kota Medan

N a m a : Abu Hanifa Batubara
N I M : 031801053
Program : Magister Administrasi Publik
Pembimbing I : Drs. Kariono, MA
Pembimbing II : Drs. Usman Tarigan, MS

Dalam rangka menyiapkan rancangan APBD, Pemerintah Daerah bersama-sama DPRD menyusun arah dan kebijakan umum APBD yang memuat petunjuk dan ketentuan-ketentuan umum yang disepakati sebagai pedoman dalam penyusunan APBD. Arah dan Kebijakan umum APBD memuat komponen-komponen pelayanan dan tingkat pencapaian yang diharapkan pada setiap lini kewenangan pemerintah yang akan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran. Sebagaimana dijelaskan dalam Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, setiap daerah harus melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) adalah forum antarpelaku dalam rangka penyusunan rencana pembangunan Nasional dan rencana pembangunan daerah.

Implementasi dari musrenbang daerah berpedoman kepada Surat Edaran Bersama antara Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Ketua BAPPENAS dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 1354/M.PPN/03/2004 dan 050/744/SJ Tentang Pedoman Pelaksanaan Forum Musrenbang dan Perencanaan Partisipatif Daerah. Dalam pedoman tersebut dijelaskan bahwa Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dimulai dari Musrenbang tingkat Desa/Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, Musrenbang Kabupaten Kota dan Musrenbang Provinsi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Implementasi Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Kecamatan Medan Area. Sampel diambil secara purposive sampling, sebanyak 43 orang. Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif guna mengetahui bagaimana Implementasi Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Kecamatan Medan Area.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara keseluruhan dari kelima indikator yang digunakan untuk mengukur implementasi program, yaitu komunikasi, sumber-sumber, kecenderungan-kecenderungan, struktur birokrasi, hasil yang diperoleh dan hambatan-hambatan, menunjukkan skor rata-rata dalam kategori baik (2,632). Namun apabila dilihat dari masing-masing indikator, menunjukkan bahwa satu indikator yaitu sumber-sumber yang termasuk kategori sedang, keempat indikator lainnya termasuk dalam kategori baik. Dapat disimpulkan bahwa Implementasi Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Kecamatan Medan Area dapat dilaksanakan cukup efektif.

Key words : Implementasi Kebijakan, Musyawarah perencanaan pembangunan.

KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis sanjungkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini sebagai suatu syarat untuk memperoleh gelar Magister Administrasi Publik pada Program Pascasarjana Universitas Medan Area.

Adapun judul Tesis ini adalah “Implementasi Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Kecamatan Medan Area”. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini masih terdapat kekurangan dan kelemahan, untuk itu segala saran dan kritik dari pembaca guna penyempurnaan tesis ini sangat penulis harapkan.

Tesis ini dapat diselesaikan ata bantuan dan dorongan dari berbagai pihak baik yang secara langsung membimbing penulisan tesis ini maupun secara tidak langsung. Dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Walikota Medan, atas izin belajar yang diberikan kepada penulis
2. Bapak Ir. Zulkarnaen Lubis, MS, Rektor Universitas Medan Area.
3. Bapak Drs. Heri Kumanto, MA, Direktur PPs Magister Admiistrasi Publik.
4. Bapak Drs. Kariono, MA, Ketua Program Studi MAP, sekaligus sebagai Pembimbing I, yang dengan kesabarannya memberikan bimbingan pada penulis
5. Bapak Drs. Usman Tarigan, MS, Pembantu Direktur II, sekaligus sebagai Pembimbing II, yang telah banyak memberikan masukan dan krtikan demi terselesainya tesis ini.

6. Bapak Drs, Mansur Usman, Camat Kecamatan Medan Area beserta staf, atas bantuan selama penulis melakukan penelitian di wilayahnya.
7. Bapak dan Ibu dosen serta staf pengajar PPs Magister Administrasi Publik Universitas Medan Area yang telah memberikan bekal ilmu serta kelancaran dalam proses penyusunan dan penyelesaian Tesis ini.

Terimakasih pula kepada kedua orang tua, istri, anak-anak dan seluruh keluarga, yang tidak pernah putus mengalirkan do'a dan memompakan semangat demi keberhasilan dan kesuksesan penulis.

Semoga amal sholeh mereka semua mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT dan kiranya tetap mendapat taufik dan rahmat Allah Subhanahu wata`ala, Amin Ya Rabbal Alamin.

Medan, Juni 2005

P e n u l i s

Abu Hanifa Batubara

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAKSI	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR LAMPIRAN.....	viii
BAB I : PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Perumusan Masalah	5
1.3. Tujuan Penelitian.....	5
1.4. Manfaat Penelitian	5
1.5. Kerangka Pemikiran.....	6
1.6. Hipotesis	10
1.7. Sistematika Penulisan.....	10
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	12
2.1. Kebijakan Publik.....	12
2.2. Implementasi Kebijakan.....	15
2.3. Pembangunan Daerah	22
2.3.1. Arah Kebijakan Umum.....	24
2.3.2. Pengertian dan Ruang Lingkup	24
2.3.3. Kriteria Penyusunan	26
2.4. Penyusunan Strategi Prioritas	28
2.5. Partisipasi Masyarakat dan Kriteria	34

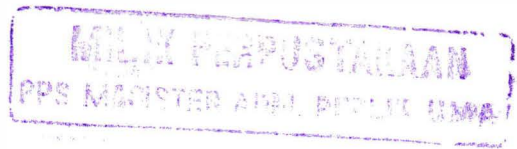
BAB III	:	METODE PENELITIAN	42
		3.1. Bentuk Penelitian	42
		3.2. Lokasi Penelitian	42
		3.3. Populasi Sasaran.....	42
		3.4. Rencana Sample	43
		3.5. Teknik Pengumpulan Data	45
		3.6. Operasionalisasi Variabel.....	46
		3.7. Teknik Analisis Data.....	48
BAB IV	:	GAMBARAN UMUM KECAMATAN MEDAN AREA	50
		4.1. Kondisi Wilayah	50
		4.2. Keadaan Penduduk	52
		4.3. Visi dan Misi Kecamatan Medan Area	54
		4.4. Masalah Yang Dihadapi.....	59
		4.5. Alternatif Pemecahan Masalah	65
		4.6. Arah dan Kebijakan Umum Pembangunan	66
BAB V	:	HASIL PENELITIAN DAN ANALISA DATA	
		5.1. Penyajian Data	69
		5.1.1. Karakteristik Responden	69
		5.1.2. Variabel Penelitian.....	73
		5.2. Analisis Data	95

BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. Kesimpulan	98
6.2. Saran - Saran	99

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

No. Tabel	Judul Tabel	Halaman
1	Distribusi Responden Menurut Jenis Kelamin	70
2	Distribusi Responden Menurut Umur	70
3	Distribusi Responden Menurut Pendidikan.....	71
4	Distribusi Responden Menurut Kedudukan dalam program	72
5	Pendapat Responden Tentang Pengetahuan Implementasi Musrenbang	73
6	Pendapat Responden Tentang Pengetahuan Tujuan Implementasi Musrenbang	74
7	Pendapat Responden Tentang Pengetahuan Adanya Perangkat Aturan dalam Implementasi Musrenbang	76
8	Pendapat Responden Tentang Pengetahuan Adanya Peraturan Tertulis dalam Pelaksanaan Implementasi Musrenbang	77
9	Pendapat Responden Tentang hak dan Kewajiban dalam Implementasi Musrenbang	79
10	Pendapat Responden Tentang Pemahaman Pengelolaan Pengembangan Jenis Usaha yang Dilaksanakan dalam Implementasi Musrenbang	80
11	Pendapat Responden Tentang Pengaturan Pengelolaan Dana dan Penentuan kegiatan dalam Implementasi Musrenbang	82
12	Pendapat Responden Tentang Bentuk Aturan Pemerintah dalam Implementasi Musrenbang	83

13	Pendapat Responden Tentang Ketersediaan Sumberdaya dalam Mendukung Kelancaran Implementasi Musrenbang	84
14	Pendapat Responden Tentang Kecukupan Dana untuk Mengelola kegiatan Dilakukan dalam Musrenbang	85
16	Pendapat Responden Tentang Dukungan Prasarana untuk Mengelola Jenis Usaha Yang Dijalankan dalam Implementasi Musrenbang	86
17	Pendapat Responden Tentang Peranan Pemerintah Kota dalam Memberikan Penyuluhan dalam Pelaksanaan Implementasi Musrenbang	88
18	Pendapat Responden Tentang Peranan Kepala Kelurahan dalam Memberikan Penyuluhan dalam Pelaksanaan Implementasi Musrenbang	89
19	Pendapat Responden Tentang Peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam Memberikan Penyuluhan dalam Pelaksanaan Musrenbang	90
20	Pendapat Responden Tentang Pertemuan yang Dilaksanakan Pelaksanaan Implementasi Musrenbang ...	91
21	Pendapat Responden Tentang Keterpaduan Komponen Pelaksanan dalam Implementasi Musrenbang	92
22	Pendapat Responden Tentang Pengaruh dari luar Komponen Pelaksanan dalam Implementasi Musrenbang	93
23	Pendapat Responden Tentang Hambatan dalam Perencanaan Implementasi Musrenbang	94
24	Pendapat Responden Tentang Hambatan dalam Pelaksanaan Musrenbang	95
25	Rata-rata Skor Implemen Musrenbang di Kecamatan Medan Area	96

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pada hakekatnya pembangunan merupakan suatu proses merubah suatu kondisi yang kurang/belum baik menjadi lebih baik hal ini merupakan masalah yang membutuhkan solusi melalui perencanaan yang matang. Dengan demikian proses pembangunan mengandung nilai perubahan yang diharapkan dapat menjadi solusi terhadap masalah-masalah yang dihadapi, berhasil tidaknya proses pembangunan dapat mencapai sasarannya sangat tergantung kepada aplikasi Sistem Manajemen Pembangunan itu sendiri.

Menurut Ryaas Rasyid (2002 : 2) Konsep otonomi menurut UU No. 5/1974 di pandang sebagai penyebab dari berbagai kekurangan yang menyertai perjalanan pemerintah di daerah selama lebih dari dua dekade terakhir, Pola ini telah memberi pembenaran terhadap berlakunya rekayasa pemilihan pemimpin pemerintahan yang tidak memiliki "*sense of public accountability*" kurangnya kewenangan yang diletakan di daerah juga telah menjadi kemampuan prakarsa dan kreativitas pemerintah daerah dalam menyelesaikan berbagai masalah dan menjawab berbagai tantangan.

Selanjutnya kelulasaan untuk menetapkan prioritas kebijakan, yang merupakan syarat penting untuk lahirnya prakarsa dan hanya bisa diambil oleh pemerintah pusat. Akibatnya, selalu terjadi kelambanan dalam

merespons dinamika dan permasalahan yang terjadi di daerah. Dalam keadaan seperti ini, partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan publik menjadi sangat lemah.

Salah satu aplikasi dari Sistem Manajemen Pembangunan adalah melalui Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat kelurahan, kecamatan, kota, propinsi, regional/wilayah pembangunan dan pusat. Forum pembangunan ini merupakan media yang cukup efektif untuk menampung aspirasi masyarakat yang sekaligus juga menjadi media pemberdayaan masyarakat selaku subjek dan objek dalam proses pembangunan.

Forum pembangunan merupakan wujud nyata dari *political will* dan komitmen pemerintah untuk mengaflikasikan Sistem Manajemen Pembangunan melalui pendekatan *bottom up planning* yang lebih konsisten dan tepat sasaran, disamping itu forum ini mengandung nilai peningkatan peran serta dan partisipasi masyarakat yang lebih optimal dalam proses perumusan kebijakan pembangunan mulai dari proses perencanaan, implementasi dan pengawasan secara *internal* dan *eksternal* organisasi.

Dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang pedoman pengurusan, pertanggung jawaban dan Pengawasan keuangan daerah serta tata cara penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah, pelaksanaan tata usaha keuangan daerah dan Penyusunan

DAFTAR PUSTAKA

- Dunn, William N., 1999, *Analisis Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Dye, Thomas R., 1995, *Understanding Public Policy*, New Jersey: Prentice Hall.
- Edward III, 1980. *Implementation Public Policy*. Washington DC : Congressional Quarter Press.
- Gibson, James L. *Organisasi dan Manajemen*, Penerbit Erlangga. Jakarta. 1990
- Grindle, Merilee S., (ed), 1980, *Politics and Apolicy Implementation in the Third World*, new jersey: Princetown University Press.
- Handyaningrat, Soewarno, 1993. *Administrasi Pemerintahan Dalam Pembangunan Nasional*. Jakarta: GunungAgung.
- Islamy, M. Irfan, 2000, *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*, Jakarta: Sinar Grafika..
- Jones, Charles O., 1991. *Pengantar Kebijakan Publik*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Manila, I GK, 1996. *Praktek Manajemn Pemerintahan Dalam Negeri*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Mardiasmo, 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta : Andi Ofset.
- Mazmanian, Daniel H., dan Paul A. Sabatier, 1983, *Implementation and Public Policy*, New York: HarperCollins.

Utomo, Warsito, 2003. *Dinamika Administrasi Publik*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Wanad, Solichin Abdul, 2002, *Analisis Kebijakan: dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*, Jakarta: Sinar Grafika.

Wasistiono, sadu, 2002. *Kapita Selekta Manajemen Pemerintahan Daerah*. Jakarta L: Fokus Media.

Widawa, Samudra, 1994. *Evaluasi Kebijakan Publik*. Jakarta : Raja Grafindo Persada,